

ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sekar Nur Wulandari

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Istana Kota Piring”
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak
Tanjungpinang
wulandari.sekar09@gmail.com

Abstrak

Kehadiran UMKM memiliki faktor penting dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan pendistribusian kepada masyarakat. Lebih lagi bahwa UMKM sebagai poin penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Jika dilihat pada aspek ketenagakerjaan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan turut serta membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Semenjak diumumkan pada akhir Maret 2020 *Corona Virus Disease* yang dikenal dengan Covid-19 sebagai pandemi internasional, maka segala kegiatan baik ditingkat Pemerintah pusat, ditingkat Daerah dan sampai kepada masyarakat terhenti. Begitu juga pada tingkat UMKM yang sebelumnya tidak mengalami masalah dalam penjualan, semenjak adanya pandemi ini sangat berdampak dalam mengembangkan UMKM, misalnya dilihat dari aspek penjualan yang menurun diakibatkan kecenderungan pembeli untuk tidak konsumtif. Kemudian pada aspek bahan baku yang sulit didapatkan, juga pada modal yang tidak mencukupi untuk melakukan produksi. Imbasnya dalam hal ini tentu pada adanya pengurangan karyawan dalam bentuk dirumahkan sementara dan bahkan sampai kepada PHK. Penelitian ini mengkaji secara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran keadaan mengenai dampak covid-19 terhadap pelaksanaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak yang cukup besar yang dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau khususnya bagi para pelaku UMKM, maka ada beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditinjau lanjuti dalam membangkitkan kembali usaha yang telah dijalankan seiring dengan adanya bantuan pemerintah, sehingga perlu ada upaya dan terobosan yang mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan saat pandemi ini. Upaya yang cukup efektif saat ini berupa membuat perubahan model bisnis dari bentuknya konvensional menjadi digital.

Kata Kunci : *Covid-19, UMKM dan Kebijakan Pemerintah*

Abstract

The presence of MSMEs has an important factor in people's lives in carrying out distribution to the community. Moreover, UMKM is an important point in national economic development. When viewed from the manpower aspect, MSMEs are able to absorb labor so that it reduces the unemployment rate and helps help in overcoming unemployment. Since it was announced at the end of March 2020 the Corona Virus Disease known as Covid-19 as an international pandemic, all activities both at the

central government level, at the regional level and reaching the community have stopped. Likewise, at the level of MSMEs, which previously had no problems in sales, since the pandemic this has had an impact on developing MSMEs, for example, seen from the aspect of sales that have decreased due to the tendency of buyers not to consume. Then in the aspect of raw materials that are difficult to obtain, also on insufficient capital to carry out production. The impact in this case is of course on employee holidays in the form of temporary layoffs and even layoffs. This study examines qualitatively descriptively by providing an overview of the impact of Covid-19 on the implementation of MSMEs in the Riau Islands Province. The results show that the large enough impact felt by the people of the Riau Islands, especially for MSME players, then there are several things that need to be followed up in reviving businesses that have been carried out with government assistance, so that efforts and breakthroughs that are capable of competing and according to current needs. Effective efforts are currently in the form of changing business models from conventional to digital forms.

Keywords: Covid-19, MSMEs and Government Policy

PENDAHULUAN

Masyarakat umum secara sadar telah melaksanakan kegiatan ekonomi guna kelangsungan hidup baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat secara berkelanjutan. Dalam melangsungkan kehidupan perekonomian diperlukan upaya-upaya yang dapat terus menumbuhkan kehidupan ekonomi, sehingga upaya ini menambah iklim ekonomi dalam kehidupan dikeluarga, masyarakat dan negara.

Sesuai dengan Dasar Negara Indonesia tertuang dalam pancasila pada sila ke 5 tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta juga tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 yang membahas pada pokok bab kesejahteraan sosial yang meliputi tiga ayat. Terutama untuk ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pada dua aspek dasar

negara ini menjadi poin penting dalam penyelenggaraan perekonomian guna membentuk masyarakat yang sejahtera. Berbagai bentuk upaya yang telah dijalankan oleh Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, salah satunya adalah dengan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kehadiran UMKM memiliki faktor penting dalam kehidupan masyarakat dalam melaksanakan pendistribusian dimasyarakat. Lebih lagi bahwa UMKM sebagai mendapatkan poin penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Jika dilihat pada aspek ketenagakerjaan bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan turut serta membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa

kontribusi UMKM mampu menyumbang sebesar 57-60% Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penyerapan tenaga kerja pada tingkat 97% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia.¹

Dalam beberapa tahun terakhir kecenderungan masyarakat sebagai pelaku usaha untuk beralih kepada UMKM semakin meningkat, hal ini dilihat dari aspek kemudahan dalam melakukan penjualan melalui digitalisasi. Sehingga tidak membutuhkan modal yang besar seperti menyewa bangunan berupa ruko, akan tetapi cukup dengan adanya perangkat berupa *smartphone* yang dapat melakukan akses internet. Ditambah lagi dengan sudah tersedianya aplikasi sehingga para pelaku usaha hanya cukup mendaftarkan diri serta barang-barang yang ingin diperjual-belikan.

Namun semenjak diumumkan pada akhir maret 2020 *Corona Virus Disease* yang dikenal dengan covid-19 sebagai pandemi maka segala kegiatan baik ditingkat Pemerintah pusat, ditingkat Daerah dan sampai kepada masyarakat sedikit terhenti. Pada kegiatan perusahaan makro banyak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan pendapatan dari hasil penjualan tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dilakukan. Pada tingkat UMKM yang sebelumnya tidak mengalami masalah dalam penjualan, maka semenjak pandemi ini

sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan UMKM, misalnya dilihat dari aspek penjualan yang menurun diakibatkan kecenderungan pembeli untuk tidak berlebihan melakukan pembelian, kemudian pada aspek bahan baku yang sulit didapatkan, juga pada modal yang tidak mencukupi untuk melakukan produksi. Imbasnya dalam hal ini tentu pada adanya pengurangan karyawan dalam bentuk pengentian sementara dan bahkan sampai kepada PHK.

Memang tidak semua UMKM mengalami pemunduran dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi tentunya sangat berdampak bagi kegiatan ekonomi. Bahkan pemerintah secara nasional juga mengalami berbagai kendala dari pelemahan ekonomi akibat pandemi ini. Upaya-upaya secara nasional telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memberikan stimulus kepada UMKM dengan memberikan bantuan langsung guna membangkitkan kegiatan UMKM kembali.

Pelemahan ekonomi yang sering tampil ke publik melalui media massa lebih dominan terjadi pada perusahaan makro, hal ini melibatkan banyak pihak yang dirugikan terutama bagi kalangan pekerja/karyawan yang dirumahkan. pada wilayah UMKM sedikit tampil dimedia, namun bukan berarti UMKM terus mengalami peningkatan signifikan akibat covid-19, akan tetapi banyak juga UMKM yang mengalami kemunduran dan bahkan ditutup dengan alasan-alasan yang logis. Bagi sebagian UMKM yang masih bertahan tentu memiliki strategi tersendiri serta membutuhkan kreatifitas agar usahanya

¹ Rizki Tri Prasetio dkk., "Upaya peningkatan produktivitas UMKM melalui implementasi ICT pada Look At Hijab Bandung," *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018). Hal. 42

tetap berjalan, misalnya awalnya hanya pada 1 produk yang terfokus maka dengan kreatifitas, dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ditengah pandemi ini.

Jika mengacu pada kondisi secara nasional maka tentu juga melihat perkembangan di daerah, mengingat kondisi di daerah menjadi acuan bagi pemerintah pusat, sehingga acuan pemerintah pusat berdasarkan dari daerah masing-masing. Mengingat kasus covid-19 di Indonesia hari ini secara global masih mencapai 373.109 kasus pada update 21 Oktober 2020.² Pemerintah pun telah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menggerakkan ekonomi dengan stimulus yang telah diberikan, terutama bagi kalangan UMKM.

Pada tingkat daerah di Kepulauan Riau dalam kasus yang diketahui dengan update 21 Oktober 2020 ada sebanyak 3.021 kasus yang ada.³ Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam mendukung program pemerintah pusat telah dijalankan terutama dalam memberikan bantuan langsung bagi UMKM. Jika dilihat secara umum di wilayah Kepulauan Riau khususnya di kota Tanjungpinang bahwa pengaruh yang paling berdampak pada aspek perhotelan, wisata dan jasa. Hal ini terlihat bahwa yang paling besar

berdampak pada merumahkan dan PHK para pekerja terhitung sejak april 2020 lalu sebesar 1.037 karyawan.⁴

Keberadaan UMKM di Kepulauan Riau dalam hal ini salah satu contohnya di Kota Tanjungpinang memang tidak sebesar jika dibandingkan bagi yang bisnis perhotelan, wisata dan jasa, akan tetapi dampak tersebut juga terasa bagi UMKM misalnya adanya penurunan omset penjualan. Menariknya bahwa pelaku UMKM di Kepulauan Riau tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa meskipun ada sedikit penurunan omset, terlebih lagi sudah ada bantuan dari pemerintah Pusat sehingga dapat membangkitkan kembali usaha mereka. Meskipun demikian, penulis merasa sangat perlu dianalisis kembali secara statistik tentang dampak yang diterima akibat pandemi covid-19 terhadap UMKM di Kepulauan Riau sehingga literasi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terutama dalam penganggaran khususnya kepada pelaku UMKM guna menstabilkan ekonomi daerah dan membantu pemulihat ekonomi nasional.

PEMBAHASAN KAJIAN

Peranan UMKM dalam Ekonomi Nasional

Usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) menjadi primadona tersendiri bagi kalangan pengusaha kelas menengah dalam mengembangkan usaha. Tentunya hal ini menjadi poin tersendiri dalam melihat dalam berbagai

² Satgas Penanganan COVID-19, "Beranda | Satgas Penanganan COVID-19," covid19.go.id, diakses 22 Oktober 2020, <https://covid19.go.id/>.

³ "Statistik Data Kasus COVID-19 - Gugus Tugas COVID-19 Kepri," diakses 22 Oktober 2020, <https://corona.kepriprov.go.id/data>.

⁴ "1.307 Pekerja di Tanjungpinang Dirumahkan dan PHK," *Republika Online*, 16 April 2020, <https://republika.co.id/share/q8ua1k384>.

persepektif. Namun perlu dipahami juga bahwa arus globalisasi saat ini terutama ketika adanya penyatuan ekonomi di tingkat asia tenggara, tentu bagi para pelaku usaha termasuk UMKM harus mampu bertahan dalam menggeluti usaha ini.

Diketahui bahwa UMKM merupakan bukti bahwa semenjak Indonesia dilanda bencana krisis ekonomi berupa krisis moneter maka UMKM menjadi faktor yang terbukti akan ketahanan dalam menghadapi situasi seperti ini. Selain itu pula bahwa UMKM tentunya dapat menyerap banyak tenaga kerja dan ini berdampak pada bentuk pengendalian tingkat pengangguran baik dalam daerah maupun pada tingkat nasional.

Melihat pada sisi pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam upaya mengajak masyarakat untuk menciptakan usaha. Bahkan hampir pada setiap daerah memberikan arahan atau himbauan kepada masyarakat untuk lebih memberdayakan UMKM. Juga pada situasi politik misalnya dalam kampanye, maka tak jarang calon kepala daerah menggalakkan bantuan kepada UMKM. Tentunya hal ini memiliki alasan tersendiri mengingat bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Dibandingkan dengan perusahaan besar yang lebih mengedepankan penggunaan teknologi dibanding dengan tenaga manusia.

Disisi lain bahwa UMKM mampu menjadi *role model* dalam pengembangan ekonomi karena mampu

menjadi stabilisator serta mengarah juga pada dinamisator dalam pengembangan ekonomi secara nasional. Khususnya di Indonesia bahwa UMKM mampu memberikan dukungan positif berupa tenaga kerja, juga menguatkan nilai-nilai produktivitas dan tetap bertahan meskipun banyak perusahaan besar dibangun.

Kehadiran UMKM tentunya berperan sangat penting bagi perusahaan besar dalam menyalurkan hasil produksinya agar produksi tersebut sampai ke tangan konsumen. Terutama pada kondisi pandemi saat ini membuat UMKM harus berpikir kembali usaha yang menarik yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga hasil tersebut mampu membuat perbedaan dari perusahaan besar dalam memproduksi barang.

Defenisi UMKM

Memetakan dampak UMKM dalam situasi pandemi covid-19 maka perlu diketahui defenisi dasar dari UMKM tersebut. Bahwa UMKM atau disebut dengan Usaha, Mikro, kecil dan Menengah maka berkaitan dengan makna industri. Bahwa industri merupakan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pengolahan bahan mentah, bahan baku, setengah jadi dan bahkan sampai kepada barang jadi. Didalamnya terdapat cabang industri yang memiliki ciri sama dalam proses produksi secara mikro.

Secara umum bahwa pengertian UMKM terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah telah

menjelaskan pada pasal 1 sebagai berikut⁵:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tentunya pengertian ini perlu dispesifikasi kembali agar bisa memahami secara jelas tentang UMKM dan memberikan gambaran tentang usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil, kategori usaha mikro dan kategori usaha menengah. Pada dasarnya dapat juga diketahui dalam Undang-undang tersebut diatas, misalnya dapat dilihat pada aspek jumlah karyawan dan penghasilan yang diterima. Misalnya dalam jumlah karyawan atau tenaga kerja, maka kategori UMKM dapat diketahui bahwa UMKM, *pertama* Usaha yang mempunyai jumlah karyawan maksimum 4 orang. Usaha kecil yaitu Usaha yang jumlah karyawannya antara 4 sampai 19 orang. Usaha menengah jumlah karyawannya minimal 20 orang dan maksimal 100 orang. *Kedua*, Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil peran besar dan tidak menjadi beban pemerintah. *ketiga*, Pada saat sekarang Ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran dan *keempat*, UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto.⁶

Jika melihat pada aspek penghasilan dan aset yang dimiliki, maka tentunya hal ini dapat diketahui bahwa: *pertama*,

⁵ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” diakses 26 Oktober 2020, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.

⁶ Darmanto, FX. Sri Wardaya, dan Lilis Sulistyani, *Kiat percepatan kinerja UMKM dengan model strategi orientasi berbasis lingkungan*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hal. 3

Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 Juta rupiah; *kedua* Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 Juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 Juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 Juta rupiah sampai dengan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah dan *ketiga*, Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh miliar rupiah.⁷ Selain pengertian yang telah dikemukakan diatas, oleh beberapa ahli memberikan defenisi UMKM dengan kelompok usaha yang memiliki usaha paling besar, sehigga menurut Rudjito bahwa UMKM sangat penting dalam mendatangkan lapangan kerja serta menjalankan usaha yang banyak.⁸ Dalam memberdayakan usaha miko, kecil dan menengah (UMKM) tentunya memiliki urgensi yang cukup besar dan memiliki nilai strategis dalam mengembangkan ekonomi nasional yakni berupa memperkuat tatanan ekonomi nasional. Kondisi

perekonomian yang tidak stabil saat ini tentu sangat berpengaruh pada sektor-sektor yang bergerak pada ekonomi dengan usaha besar, sementara UMKM masih dapat dikatakan relatif stabil serta mampu menjaga ketahanan usahanya.

Masalah yang dihadapi UMKM

Dalam menjalankan UMKM tentunya tidak serta merta berjalan dengan lancar, khususnya bidang usaha yang saat ini bagi kalangan para UKM. Berbagai permasalahan yang diterima dan dipahami sehingga jika suatu usaha tersebut tidak mampu dan mau untuk lebih kreatif dari usaha tersebut, maka usaha tersebut dalam keadaan tetap dan bahkan sampai kepada kemunduran yang berakibat tutupnya usaha tersebut. Oleh karena itu perlunya melihat berbagai gejala masalah yang timbul dari usaha mikro yang sering terjadi bagi pelaku usaha. Masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah berupa: *pertama*, terbatasnya modal yang dimiliki berupa modal investasi; *kedua*, sulitnya memperoleh bahan baku yang memiliki kualitas bagus serta harga yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha kecil; *ketiga*, teknologi yang belum mumpuni; *keempat*, belum memiliki sumber daya manusia dengan kualitas baik (sisi manajemen dan produksi) dan *kelima*, informasi mengenai pemasaran dan dunia pasar yang masih terbatas.⁹ Lebih lanjut yang berkaitan dengan tantangan dalam menghadapi krisis global yang disampaikan oleh Mudrajad Kuncoro dalam harian bisnis Indonesia

⁷ *Ibid*

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hal. 22

⁹ Tulus Tambunan, *Usaha kecil dan menengah di indonesia beberapa isu penting* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). Hal. 73

tanggal 21 Oktober 2008 yang dikatakan bahwa: *pertama*, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang; *Kedua*, kecilnya akses yang dimiliki oleh industri kecil kepada lembaga kredit; *Ketiga*, terbatasnya status badan hukum yang dimiliki oleh usaha kecil; *keempat*, tren ekspor yang tidak stabil dan selalu menunjukkan tren yang berubah; *kelima*, permasalahan pengadaan bahan baku yang terbilang mahal harganya; *keenam*, tenaga kerja yang belum terampil serta mahalnya permintaan biaya tenaga kerja; *ketujuh*, banyaknya pesaing yang memiliki usaha yang sama serta keterbatasan dalam berkomunikasi bahasa asing.

Selain itu disadari bahwa modal menjadi hal yang penting dalam menggerakkan usaha. Dengan besarnya modal dimiliki tentu peluang untuk mendapatkan serta mempromosikan secara baik akan memungkinkan bagi pelaku usaha. Keterbatasan modal setidaknya ada 3 masalah yang terjadi: *pertama*, rendahnya akses bagi para pelaku usaha kecil menengah dalam mendapatkan informasi, layanan dan fasilitas keuangan; *kedua*, sulitnya administrasi dalam melakukan pinjaman serta hasil yang tidak sesuai dengan pinjamaman; *ketiga*, pemberian tingkat bunga yang tinggi sehingga menyulitkan UMKM.¹⁰ Sementara itu tambahan menurut urata dalam pramiyanti bahwa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM itu ada 2 bentuk

yakni dalam masalah keuangan (finansial) dan juga masalah manajerial (nonfinansial). Dalam masalah non keuangan meliputi dari: *pertama*, tidak sesuai dana yang tersedia oleh UMKM; *kedua*, belum tampak pendekatan kepada UMKM secara sistematis; *ketiga*, masalah biaya yang tinggi; *keempat*, akses ke lembaga formal masih terbatas; *kelima*, pemberian bunga yang tergolong tinggi bagi pelaku UMKM; *keenam*, masalah manajerial keuangan yang belum tercapai secara baik.¹¹

Sedangkan untuk tingkatan non finansial berhubungan pada: *pertama*, minim dalam penguasaan teknologi serta kurangnya literasi dalam pendidikan dan pelatihan teknologi; *kedua*, minimnya literasi dalam pemasaran; *ketiga*, SDM yang terbatas; *keempat*, minimnya pengetahuan tentang manajerial keuangan dan akuntansi.¹²

Berbagai kendala diatas menjadi pengahambat bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan lebih baik usahanya serta kecenderungan usaha menjadi semakin menurun. Terlebih lagi menghadapi situasi yang sulit yang dirasakan saat ini. Sehingga pemerintah harus mengambil sikap dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah agar mampu bersaing dan bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Usaha mikro dalam kegiatan usahanya selain mengalami kendala-kendala berupa permasalahan yang dihadapi

¹⁰ Sri Lestari, "Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM* 4 (2009). Hal. 118

¹¹ Alila Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008).

¹² *Ibid*

tentunya juga dapat diperhatikan dari kekuatan dan kelemahan. Dalam hal kekuatan maka dapat diketahui bahwa sebagai berikut: *pertama*, penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak; *kedua*, lahirnya wirausaha baru; *ketiga*, memiliki segmen pasar tersendiri; *keempat*, menjadikan para UMKM berpikir kreatif dalam memanfaatkan ide-ide terbaru dalam pengembangan usaha; *kelima*, kesempatan untuk berkembang cukup besar.¹³

Sedangkan untuk kelemahan dalam UMKM selain dari yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sisi lain dari kelemahan UMKM sebagai berikut: *pertama*, pola manajerial yang belum baik; *kedua*, penyaluran yang belum efektif; *ketiga*, kurangnya promosi yang dilakukan; *keempat*, modal yang terbatas; *kelima*, SDM yang belum mumpuni.¹⁴

Tentunya dalam memahami kekuatan dan kelemahan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada baik dalam hal internal maupun eksternal. Sehingga dengan memahami berbagai kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan usaha segala strategi dapat dijalankan secara baik. Dengan kekuatan yang dimiliki tentu dapat dikembangkan lagi potensi yang ada, sebaliknya dengan kelemahan yang ada maka dapat dihindari dari berbagai macam kendala-

kendala untuk menjalankan usaha tersebut.

Strategi UMKM menghadapi pandemi.

Perjalanan usaha tidak serta merta berjalan dengan baik begitu saja, jika pelaku usaha mampu melihat potensi yang tersedia tentu akan memainkan perannya dengan berbagai strategi yang dijalankan. Terlebih lagi pandemi ini membuat para pelaku usaha merasa kelimpungan. Mulai dari modal yang terbatas, sampai kepada bahan baku yang sulit didapatkan. Hal ini cukup berdampak pada aspek keuangan tingkat keluarga sampai kepada pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh pelaku usaha.

Namun perlu dipahami bahwa memang kenyataan sulit untuk berkembang ditengah pandemi ini, akan tetapi kesempatan itu selalu ada asalkan dikuatkan dengan strategi yang mumpuni. Misalnya kata Prof. Dr. Musa Hubeis, dosen IPB dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) yang mengatakan bahwa tetap ada yang peluang yang dimiliki oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan pola digitalisasi UMKM dan juga mentransformasi bisnis dari produk dan jasa dengan menciptakan kreativitas sesuai kebutuhan yang diinginkan saat ini.¹⁵

Online selling saat ini menjadi primadona dalam berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar kegiatan usahanya tetap berjalan seperti biasa dengan memperhatikan

¹³ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* (Yogyakarta: Dwi Candra Wacana, 2010). Hal. 66

¹⁴ Alfi Amalia, Wahyu Hidayat, dan Agung Budiarmo, "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarang di Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2012). Hal. 104

¹⁵ "Pakar IPB: Ini Strategi UMKM di Tengah Pandemi," *Republika Online*, 18 Juli 2020, <https://republika.co.id/share/qdo6nf374>.

pola kesehatan. Media sosial menjadi trik bagi para pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya. Bagi para pelaku usaha lain yang sebelumnya tidak mengandalkan bidang teknologi, dalam keadaan seperti ini tentu harus ikut terlibat dalam digitalisasi.

Selain itu upaya untuk memberikan rasa kedekatan dengan konsumen maka perlu membuat inovasi-inovasi baru sehingga konsumen akan terus mau bertransaksi dengan usaha yang dilakukan. Selain itu inovasi lain berupa para pelaku juga dapat mengambil kesempatan dari pandemi ini dengan memperhatikan kebutuhan yang paling penting dari konsumen saat ini.

Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Kepulauan Riau

Sejak kemunculannya pada akhir 2019 lalu, pandemi covid-19 masih terasa sampai hari ini dengan telah menyerang jutaan manusia diseluruh dunia, namun para peneliti telah berusaha untuk menemukan obat yang terbaik dalam menanggulungnya. Meskipun demikian pemerintah Indonesia khususnya telah berupaya memberikan peringatan untuk terus menjaga kesehatan.

Pandemi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku usaha berupa terjadi perlambatan ekonomi yang sangat dirasakan. Dampak ini berimbas pada pelaku usaha besar mulai dari harga minyak yang jatuh sampai kepada bursa saham yang anjlok dan juga berbagai komoditas lain yang bisa dirasakan saat ini. Diberbagai industri wisata juga mendapatkan dampak yang besar akibat tidak adanya wisatawan yang datang, ditambah lagi khususnya di Indonesia ada beberapa negara asing

yang melarang datang ke Indonesia untuk sementara waktu.

Penurunan wisata ini bukan hanya pada aspek wisata saja, akan tetapi berimbas pada lingkungan sekitar berupa kehadiran UMKM yang ada disekitar wisata juga berdampak. Kehadiran pariwisata memiliki dampak besar bagi pelaku UMKM disekitarnya. Diketahui bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.

Dapat dilihat hari ini misalnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai provinsi dengan banyak mengembangkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui pariwisata. Semenjak pandemi covid-19 ini, menurut data dari kepala dinas pariwisata yang didapat bahwa ada sekitar 14.000 karya terdampak dari covid-19 yang terdiri dari Industri travel, hotel, asosiasi pariwisata hingga ekonomi kreatif. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.

Dampak ini sangat dirasakan bagi para pelaku usaha kuliner di Kepulauan Riau, sebab pemerintah membatasi adanya kegiatan transaksi secara tatap muka atau makan ditempat. Sehingga ini berdampak pada berkurangnya modal usaha yang dimiliki.

Saat ini memang pemerintah telah memberikan bantuan kepada UMKM terutama dari Kementerian koperasi dan UKM. Sehingga stimulus ini berupaya untuk membangkitkan UMKM kembali. KemenkopUKM telah berupaya memberikan stimulus kepada UMKM yakni: biaya pinjaman yang

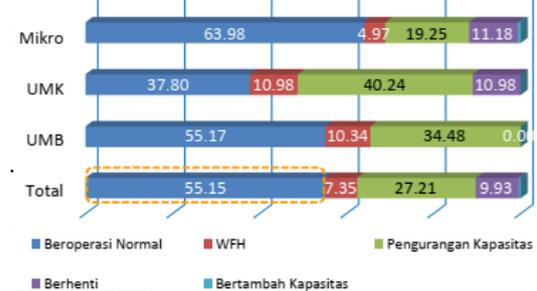
dilonggarkan, pajak diberikan keringanan bagi UMKM, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro.¹⁶

Dalam data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Wilayah Provinsi Kepulauan Riau bahwa setidaknya dari UMKM yang terdampak, bahwa dijelaskan dengan data sebagai berikut¹⁷:

Diagram Persentase keberlangsungan perusahaan

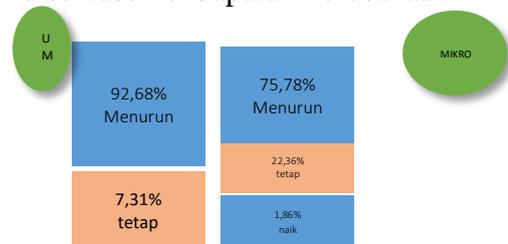
pengurangan kapasitas dan bahkan melakukan untuk berhenti sebanyak 10,98%. Sedangkan untuk sasaran mikro yang melakukan pengurangan kapasitas sebanyak 19,25% dan ada 11,18 % yang dinayakan berhenti beroperasi.

Perlu menjadi perhatian juga untuk UMK, dimana dari setiap 100 perusahaan UMK hanya 37 perusahaan saja yang mampu bertahan beroperasi secara normal. Kemudian dari 55.15



Pada skala persentase pendapatan, maka BPS telah menunjukkan dalam surveynya dijelaskan dalam diagram berikut¹⁸:

Persentase Pendapatan Perusahaan



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Persentase terbesar untuk perusahaan yang berhenti beroperasi akibat pandemik covid berada pada skala usaha mikro dibanding perusahaan dengan skala usaha besar ataupun menengah kecil. Perlu menjadi perhatian karena usaha mikro ini menyasar masyarakat menengah ke bawah. Dalam data tersebut terdapat 37,80% pada UMK yang mampu bertahan, sedangkan ada sekitar 40,24% yang melakukan

Dari data diatas bahwa pada skala persentase pendapatan perusahaan khususnya untuk UMK dan mikro dapat dilihat bahwa tren penurunan pendapatan dari UMK sangat besar yakni 92,68%, sedangkan untuk Mikro bahwa tren penurunannya 75,78% dan

¹⁶ Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, 59–64.

¹⁷ "Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau," diakses 28 Oktober 2020, <https://kepri.bps.go.id/publication.html>.

¹⁸ *Ibid*

ada 1,86% yang mengalami peningkatan.

Data tersebut diatas hendaknya dipahami oleh para pihak tentang dampak yang cukup besar atas perlambatan ekonomi akibat pandemi ini. Meskipun demikian perlunya dukungan dari pemerintah merupakan hal utama dalam mendukung usaha mereka khususnya bagi UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Pandemi ini berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan khususnya pada UMKM yakni berupa: *pertama*, Tidak Tercukupinya Keuangan Perusahaan; *kedua*, Bahan Baku Tidak Tersedia atau Harga Menjadi Mahal; *ketiga*, Rekan Bisnis Terdampak sangat Buruk Akibat Pandemi Covid 19; *keempat*, Pelanggan Terdampak Covid sehingga Permintaan Turun.¹⁹

Melihat dampak yang cukup besar yang dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau khususnya bagi para pelaku UMKM, maka ada beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditinjau lanjuti dalam membangkitkan kembali usaha yang telah dijalankan seiring dengan adanya bantuan pemerintah, maka perlu ada upaya-upaya dan terobosan yang mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan saat pandemi ini.

Upaya yang cukup efektif saat ini berupa membuat perubahan model bisnis dari bentuknya konvensional menjadi digital. Menghadirkan kemudahan dalam berbelanja adalah kenyataan yang harus dijalani mengingat efisiensi daya,

meminimalisir biaya, terhindar dari kerepotan, tidak lapar mata, serta faktor kenyamanan menjadi prioritas bagi pelanggan saat ini.²⁰ Apalagi melihat kondisi di Kepulauan Riau ini kasus yang terjadi masih terbilang cukup tinggi pertambahan kasusnya.

KESIMPULAN

Kehadiran covid-19 membawa dampak besar dalam perlambatan ekonomi di Indonesia. Khususnya dalam hal UMKM yang ada di wilayah Kepulauan Riau dari data sampel yang didapatkan melalui data yang diperoleh BPS Provinsi Kepulauan Riau bahwa semenjak covid-19 dari aspek keberlangsungan usaha maka hampir dapat dikatakan bawa usaha dalam UMKM mengalami perubahan yakni berupa adanya pengurangan kapasitas dan bahkan sampai kepada pemberhentian. Hal ini tentunya menjadi miris sehingga daya tarik ekonomi juga akan sangat berpengaruh. Meskipun demikian, modal yang cukup tanpa dibarengi dengan pola manajemen yang baik, maka juga akan menjadi kurang baik. Pola manajemen tersebut bisa berupa mengubah pola bisnis yang dijalankan yakni dengan memberikan strategi khusus sesuai kebutuhan saat ini, misalnya dengan menggunakan teknologi atau dikenal dengan secara digital.

²⁰ Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran 2*, no. 1 (2020): 123-131. Hal. 127-128

¹⁹ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Republika Online. "1.307 Pekerja di Tanjungpinang Dirumahkan dan PHK," 16 April 2020. <https://republika.co.id/share/q8ua1k384>.
- Amalia, Alfi, Wahyu Hidayat, dan Agung Budiarmo. "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarang di Kota Semarang." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2012).
- Amri, Andi. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia." *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1 (2020): 123–31.
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: Dwi Candra Wacana, 2010.
- "Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau." Diakses 28 Oktober 2020. <https://kepri.bps.go.id/publication.html>.
- COVID-19, Satgas Penanganan. "Beranda | Satgas Penanganan COVID-19." covid19.go.id. Diakses 22 Oktober 2020. <https://covid19.go.id/>.
- Darmanto, FX, Sri Wardaya, dan Lilis Sulistyani. *Kiat percepatan kinerja UMKM dengan model strategi orientasi berbasis lingkungan*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Karim, Adiwirman A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Lestari, Sri. "Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)." *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM* 4 (2009).
- Republika Online. "Pakar IPB: Ini Strategi UMKM di Tengah Pandemi," 18 Juli 2020. <https://republika.co.id/share/qdo6nf374>.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, 59–64.
- Pramiyanti, Alila. *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- Prasetyo, Rizki Tri, Ade Mubarak, Yudi Ramdhani, Erfian Junianto, Ali Akbar Rismayadi, Iedam Fardian Anshori, Syarif Hidayatulloh, dan Salman Topiq. "Upaya peningkatan produktivitas UMKM melalui implementasi ICT pada Look At Hijab Bandung." *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018).
- "Statistik Data Kasus COVID-19 - Gugus Tugas COVID-19 Kepri." Diakses 22 Oktober 2020. <https://corona.kepriprov.go.id/data>.
- Tambunan, Tulus. *Usaha kecil dan menengah di Indonesia beberapa isu penting*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." Diakses 26 Oktober 2020. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.